



JPPKMI

JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jppkmi>



Unit Cost sebagai Dasar Penentuan Tarif Rasional: Studi Kasus Puskesmas Ngemplak II Yogyakarta

Jati Untari¹✉, Yelli Yani Rusyani¹, Markus Gelar Kumara Agni¹, Desi Kumalasari¹

¹Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 4 Mei 2021
Disetujui 15 Juni 2021
Dipublikasi 23 Juni 2021

Keywords:

Unit Cost, Tariff, Health Center

URL:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jppkmi/article/view/47206>

Abstrak

Masalah tarif pelayanan selama ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pelayanan kesehatan pemerintah di era BPJS sekarang ini. Selama ini, tarif biasanya ditetapkan oleh pemerintah tanpa suatu kajian yang rasional (perhitungan *unit cost*). Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan *unit cost* di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data keuangan di Poli KIA-KB Puskesmas Ngemplak II. Hasil *unit cost* menunjukkan bahwa tarif untuk pelayanan ANC sebesar Rp 19,975 sedangkan tarif non subsidi sebesar Rp 17,000, pelayanan KB suntik Rp 24,756 sedangkan tarif non subsidi sebesar Rp 24,000, dan untuk pelayanan imunisasi Rp 20,447 dengan tarif non subsidi Rp 17,000. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tarif pelayanan Poli KIA-KB yang terdiri dari pelayanan Antenatal Care, KB Suntik, dan Imunisasi di Puskesmas Ngemplak II masih di bawah *unit cost*.

Abstract

The problem of service rate during this time is still a major problem faced by government health services in the current BPJS era. All this time, rate are usually set by the government without a rational study (unit cost calculation). This study aims to analyze the calculation of unit cost in Ngemplak II Public Health Service Sleman District Yogyakarta. This research is a descriptive study with financial data analysis at Poli KIA-KB at Ngemplak II Health Center. The unit cost results show that the tariff for ANC services is 19,975 IDR while the non-subsidized rate is IDR 17,000, the injection family planning service is IDR 24,756 while the non-subsidized rate is 24,000 IDR, and for the immunization service 20,447 IDR with a non-subsidized rate of IDR 17,000. The conclusion of this research is tariff of Poly KIA-KB service which consist of Antenatal Care service, KB Injection, and Immunization at Ngemplak II Health Center still under unit cost.

© 2021 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

JL. Laksda Adisucipto KM 6,3
Depok, Sleman, Yogyakarta
E-mail: jatiuntari@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi desentralisasi pada awal tahun 2001 mengubah kebijakan secara substansi dengan memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah, dan ke kabupaten/kota pada khususnya. Untuk kebijakan kesehatan dan munculnya *universal health coverage*, otonomi daerah berdampak pada dua perkembangan penting yaitu yang pertama adalah peningkatan otonomi kebijakan di tingkat kabupaten/kota memicu berbagai eksperimen kebijakan dan inovasi dalam kebijakan dan inovasi dalam kebijakan kesehatan. Perkembangan kedua terkait dalam kebijakan kesehatan menyusul pelaksanaan reformasi desentralisasi adalah terdapat ketimpangan dalam akses ke layanan kesehatan.²

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang wajib bersifat pelayanan dasar. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.

Dalam pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit, tarif biasanya ditetapkan oleh pemerintah yang terkadang tanpa suatu kajian yang rasional dengan melakukan perhitungan *unit cost*. Tarif ini biasanya ditetapkan melalui suatu peraturan pemerintah untuk rumah sakit umum pusat, dan peraturan daerah untuk rumah sakit umum provinsi, rumah sakit umum kabupaten/kota maupun puskesmas. Hal ini menunjukkan adanya kontrol ketat dari pemerintah sebagai pemilik sarana pelayanan tersebut. Akan tetapi disadari bahwa tarif pemerintah biasanya mempunyai "*cost recovery*" yang rendah.

Dilema lain yang dihadapi oleh pelayanan kesehatan pemerintah adalah adanya misi sosial yang wajib diemban sehingga memaksa rumah sakit pemerintah dan

puskesmas untuk menetapkan tarif rendah dengan kata lain tarif lebih rendah dibandingkan dengan *unit cost* di sisi lain rumah sakit pemerintah juga dituntut untuk memberikan pelayanan berkualitas yang mau tidak mau membutuhkan biaya. Akibatnya rumah sakit pemerintah tidak memiliki posisi tawar yang kuat terhadap pihak ketiga misalnya asuransi kesehatan. Gambaran masalah di atas dihadapi pula oleh seluruh puskesmas di Indonesia. Kebijakan kesehatan seringkali dirancang untuk mencapai 2 tujuan penting sekaligus yaitu kebijakan pelayanan yang berkualitas tinggi dan pencapaian pelayanan dengan biaya rendah.

Penetapan tarif layanan kesehatan bukanlah hal yang mudah, terdapat banyak sekali variabel yang harus dipertimbangkan agar tarif yang ditetapkan menjadi tarif yang rasional dan dapat diterima oleh semua *stakeholder*, salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah biaya satuan (*unit cost*). *Unit cost* dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal ataupun pihak internal puskesmas. Informasi *unit cost* dibutuhkan oleh pihak eksternal untuk mengetahui berapa besarnya *unit cost* pelayanan di rumah sakit, yang kemudian oleh pihak eksternal tersebut, informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hubungan mereka dengan pihak rumah sakit. Sebagai contoh, pemerintah sebagai pihak eksternal rumah sakit membutuhkan informasi tentang *unit cost* sebagai dasar untuk mempertimbangkan besarnya tarif paket jaminan dan pemberian subsidi.

Kabupaten Sleman termasuk salah satu kabupaten di DI Yogyakarta dengan jumlah 17 kecamatan yang memiliki puskesmas rawat inap sebanyak 42 dan non rawat inap sebanyak 79 buah. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Sleman terdiri dari puskesmas sebanyak 25 buah 5 diantaranya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap yaitu Puskesmas Mlati II, Puskesmas Ngemplak I, Puskesmas Minggir, Puskesmas Kalasan dan Puskesmas Sleman. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 71 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, dengan demikian seluruh desa sudah

memiliki sarana pelayanan kesehatan.

Sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan bupati sleman No. 59 tahun 2012. Tarif pelayanan poliklinik kesehatan ibu anak dan keluarga berencana yaitu sebagai berikut:⁷

Tabel 1. Tarif Pelayanan Poliklinik Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana, dan Imunisasi di Pusat Kesehatan Masyarakat

Jenis Pelayanan	Tarif Non Subsidi	Tarif Subsidi
Pemeriksaan ANC	Rp. 17.000	Rp. 5.000
Suntik KB	Rp. 24.000	Rp. 12.500
Imunisasi	Rp. 17.000	Rp. 5.000

Sumber: Peraturan Bupati Sleman No. 59 tahun 2012

Berdasarkan data yang diperoleh, pada saat melakukan studi pendahuluan di Puskesmas Ngemplak II Sleman Yogyakarta terdapat jumlah pengunjung selama Tahun 2015 yaitu sebanyak 36.573 kunjungan. Serta total pendapatan yang diperoleh oleh puskesmas dari pelayanan KIA-KB pada bulan Januari sampai Desember Tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 72.048.000,00.⁸

Metode analisis yang digunakan untuk perhitungan biaya satuan (*unit cost*) adalah metode *Real cost*. Analisis ini dilakukan dengan cara sebagai berikut 1). Identifikasi semua biaya yang mungkin timbul akibat adanya kegiatan di unit, berupa biaya tetap, biaya semivariabel dan biaya tidak tetap, 2). Analisis instalasi atau bagian lain yang memberi konsekuensi biaya sesuai variasi kegiatan di unit, 3). Identifikasi dan hitung semua biaya langsung yang terjadi, 4). Identifikasi biaya tetap dan hitung alokasi biaya tidak tetap, Hitung *unit cost* per pelayanan dengan cara mengalokasikan total biaya (biaya tetap, biaya semivariabel, biaya tidak tetap) ke setiap jasa pelayanan.

Namun, dikarenakan produk pada penelitian ini bersifat heterogen maka

perhitungan biaya satuan (*unit cost*) dengan menggunakan *Relative Value Unit* (RVU).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluatif. Tujuan dari jenis penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data berkenaan dengan biaya tindakan ANC, KB suntik, dan imunisasi di pelayanan KIA KB Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode analisis biaya *real cost*. Penelitian ini menggunakan data keuangan tahun 2015.

Analisis biaya satuan dilakukan dengan *spreadsheet* pada *microsoft excel*. Perhitungan biaya dilakukan dengan metode *real cost* yaitu melakukan identifikasi terhadap seluruh biaya tetap dan biaya tidak tetap yang terjadi pada setiap tindakan ANC, KB suntik, dan imunisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fungsinya, biaya dapat dibagi menjadi biaya investasi, biaya

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Pegawai Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Bagian	Jumlah Pegawai
PJ. Umum dan Kepegawaian	1
Administrasi Keuangan	3
Kepala dan Kasubbag TU	2
Administrasi Umum	2
Dokter	4
Bidan	5
Perawat	7
Farmasi	2
Rekam Medis	1
Laboran	1
Gizi	1
Sanitarian	1
Informasi dan Teknologi	1
Penjaga Keamanan	1
Kebersihan dan Taman	1
PJ. Pengemudi	1
Jumlah	34

Sumber: Data Sekunder Puskesmas Ngemplak II tahun 2015

Tabel 3. Jumlah Kunjungan Poli KIA-KB Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Pelayanan	Jumlah Kunjungan
Antenatal Care (ANC)	2.355
KB Suntik	1.418
Imunisasi	1.220
Jumlah	4.993

Sumber: Data Sekunder Puskesmas Ngemplak II tahun 2015

Tabel 4. Biaya Penyusutan Alat Medis Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Alat Medis	Jumlah	Harga Pokok (Rp)	Total (Rp)	Masa Pakai (Tahun)	Penyusutan (Rp)
Dopler	3	13.500.000	40.500.000	5	8.100.000
Stetoskop	2	2.300.000	4.600.000	5	920.000
Tensimeter	3	350.000	1.050.000	5	5.250.000
Timbangan badan	2	450.000	900.000	5	4.500.000
Termometer	1	3000.000	300.000	5	60.000
Alat ukur tinggi badan	1	32.000	32.000	5	6.400
Bengkok	10	350.000	3.500.000	5	700.000
Pinset	9	112.500	112.500	5	22.500
Tang anak	2	180.000	360.000	5	72.000
Tang dewasa	5	450.000	2.250.000	5	450.000
Bak instrument	5	40.000	200.000	5	40.000
Spekulum	5	70.000	350.000	5	70.000
Timbangan bayi	1	345.000	345.000	5	69.000
		Jumlah			20.259.900

Sumber : Data Sekunder Puskesmas Ngemplak II tahun 2015

operasional dan biaya pemeliharaan. Alokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 15%. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari tabel 2.

Dari tabel 2 Menunjukkan bahwa profesi bidan adalah pegawai yang bekerja di Poli KIA-KB. Jumlah pegawai keseluruhan yaitu sebanyak 34 orang dan pegawai di poli KIA-KB berjumlah sebanyak 5 orang sehingga perbandingan jumlah pegawai untuk poli KIA-KB sebesar 15% dari total keseluruhan jumlah pegawai.

Tabel 3 menunjukkan bahwa untuk jumlah kunjungan Poli KIA-KB paling banyak pada tahun 2015 yaitu pada pelayanan ANC sebesar 2.355 kunjungan dari total kunjungan sebanyak 4.993.

1. Biaya Investasi

Komponen biaya investasi yang dianalisis meliputi biaya penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, biaya penyusutan peralatan medis serta penyusutan peralatan non medis.

Biaya Penyusutan Alat Medis

Biaya penyusutan alat medis merupakan biaya yang kegunaannya atau pemanfaatan alat medis tersebut bisa berlangsung selama lebih dari satu tahun. Alat-alat medis yang terdapat di Poli KIA-KB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Data tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah biaya penyusutan alat medis untuk Poli KIA-KB yaitu sebesar Rp.20.259.900,00.

Biaya Penyusutan Alat Non Medis

Biaya penyusutan alat non medis merupakan biaya yang kegunaannya atau pemanfaatan alat non medis tersebut bisa berlangsung selama lebih dari satu tahun.

Data tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah biaya penyusutan alat non medis untuk Poli KIA-KB yaitu Rp.5.334.200,00.

Biaya Penyusutan Gedung dan Kendaraan

Biaya penyusutan gedung dan kendaraan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kendaraan modal yang berhubungan dengan

Tabel 5. Biaya Penyusutan Alat Non Medis Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Alat Non Medis	Jumlah	Harga Pokok (Rp)	Total (Rp)	Masa Pakai (Tahun)	Penyusutan
Lemari Obat	1	350.000	350.000	5	70.000
Tempat Tidur	2	5.025.000	10.050.000	5	2.010.000
Lemari alkon	1	2.320.000	2.320.000	5	464.000
Telepon	1	500.000	500.000	5	100.000
Kipas angin	1	350.000	350.000	5	70.000
AC	1	3.750.000	3.750.000	5	750.000
Komputer	1	4.400.000	4.400.000	5	880.000
Kursi	6	300.000	1.800.000	5	360.000
Kursi Tunggu	1	1.500.000	1.500.000	5	300.000
Meja	5	567.000	1.701.000	5	340.200
		Jumlah			5.344.200

Sumber : Data Sekunder Puskesmas Ngemplak II tahun 2015

Tabel 6. Biaya Penyusutan Gedung dan Kendaraan Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Nama Sarana	Masa Pakai	Harga Pokok (Rp)	Alokasi (Rp)	Nilai Ekonomis	Penyusutan
Puskesmas	6	1.278.671.000	191.800.650	30	6.393.355
Ambulance	2	195.485.000	29.376.750	8	3.672.094

Sumber : Data Sekunder Puskesmas Ngemplak II tahun 2015

pembangunan dan kendaraan yang pemanfaatannya yang berlangsung selama lebih dari satu tahun.

Dari tabel 6. Menunjukkan bahwa jumlah biaya penyusutan untuk gedung khusus untuk pelayanan KIA-KB yaitu sebesar Rp.6.393.355 dan jumlah biaya penyusutan kendaraan untuk pelayanan KIA-KB yaitu sebesar Rp. 3.672.094,00.

2. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan adalah biaya yang diperlukan untuk menjaga atau memperthankan kapasitas barang investasi agar barang investasi tersebut dapat bertahan lama. Komponen biaya pemeliharaan yang dianalisis yaitu biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan alat medis dan biaya pemeliharaan alat non medis.

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa biaya untuk pemeliharaan gedung untuk Poli KIA-KB yaitu sebesar RP. 2.389.965,00, biaya untuk Pemeliharaan Alat Non Medis Poli KIA-KB yaitu sebesar Rp.1.728.079,00, biaya untuk pemeliharaan Alat Medis Poli KIA-KB yaitu sebesar Rp.190.500,00. Biaya pemeliharaan

Tabel 7. Biaya Pemeliharaan Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Bagian	Jumlah	Biaya (Rp)
Gedung Puskesmas	15.933.100	
Poli KIA-KB	2.389.965	
Alat Non Medis Puskesmas	11.520.528	
Alat Non Medis Poli KIA-KB	1.728.079	
Alat Medis Puskesmas	1.270.000	
Alat Medis Poli KIA-KB	190.500	

Sumber: Data Sekunder Puskesmas Ngemplak II tahun 2015

untuk Poli KIA-KB diperoleh dari hasil pengalokasian sebesar 15%.

3. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat “habis pakai” dalam kurun waktu relatif singkat biasanya kurang dari satu tahun. Komponen biaya operasional yang dianalisis yaitu biaya gaji pegawai, biaya listrik, biaya telepon, biaya bahan habis pakai dan

Tabel 8. Biaya Listrik dan Telepon Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Jenis Biaya	Jumlah Biaya (Rp)	Biaya di Poli KIA-KB (Rp)
Telepon	802.747	120.412
Listrik	6.000.000	900.000

Tabel 9. Biaya Bahan Habis Pakai Medis Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Bahan Medis	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
Alat suntik sekali pakai 1 ml	1233	637	785.421
Alat suntik sekali pakai 3 ml	140	637	89.180
Sarung tangan no.7	13	994	12.922
Sarung tangan non steril M	490	761	372.890
Sarung tangan non steril L	200	637	127.400
Sarung tangan non steril S	400	637	254.800
Providon yodium 10% 30 ml	7	14.203	99.421
Masker	1340	300	402.000
Alkohol	100	98	9.800
Kassa pembalut	8	2.058	16.464
Larutan hcl 0,1 N	1	8.470	8.470
Betadine	3	8.500	25.500
Tisu	2	6.500	13.000
Kapas pembalut	10	12.250	122.500
	Jumlah		2.339.768

Sumber : Data Sekunder Puskesmas Ngemplak II tahun 2015

biaya BHP non medis. melaksanakan kegiatan-kegiatan di Poli KIA-KB.
 Biaya Listrik dan Telepon
 Biaya listrik dan telepon merupakan Dari tabel 8 menunjukkan bahwa biaya biaya operasional yang diperlukan untuk telepon di Poli KIA-KB yaitu sebesar

Tabel 10. Biaya BHP Non Medis Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Jenis Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Kartu ibu	3	90.000	270.000
Buku kohort ibu hamil	35	25.000	875.000
Kartu ibu lanjutan	5	90.000	450.000
Kartu balita sehat	2	70.000	140.000
Kartu balita sehat lanjutan	2	70.000	140.000
Buku register ANC	7	33.000	231.000
Buku register KB	4	33.000	132.000
Buku register bayi sehat	7	33.000	195.000
Form MTBS	3	65.000	70.000
Kartu KB	1	70.000	140.000
Kartu KB lanjutan	2	70.000	140.000
Form ANC	2	70.000	140.000
Form ANC lanjutan	2	65.000	130.000
Form 10 T	4	70.000	280.000
Cetak kartu ibu lanjutan	3	700.000	2.100.000
Form KB	2	65.000	130.000
Form bayi balita sehat	2	65.000	130.000
Cetak kohort KB	10	25.000	250.000
Cetak kohort bayi	6	33.000	198.000
Cetak kohort anak balita	96	23.000	2.185.000
	Jumlah		8.417.000

Sumber: Data Sekunder Puskesmas Ngemplak II tahun 2015

Tabel 11. Biaya Gaji Pegawai Poli KIA-KB Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Nama Pegawai	Gaji (Rp)	Gaji Selama Setahun (Rp)
A	308.750	3.705.000
B	308.750	3.705.000
Jumlah		7.410.000

Sumber : Data Sekunder Puskesmas Ngemplak II tahun 2015

120.412,00 sedangkan untuk biaya listrik di Poli KIA-KB yaitu sebesar 900.000,00. Biaya listrik dan telepon untuk Poli KIA-KB diperoleh dari hasil pengalokasian sebesar 15%.

Biaya Bahan Habis Pakai

Biaya bahan habis pakai merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang terdapat di Poli KIA-KB khusus pelayanan ANC, KB Suntik, dan Imunisasi. Dari tabel 9 menunjukkan bahwa biaya bahan habis pakai untuk pelayanan KIA-KB yaitu sebesar Rp.2.339.768, 00.

Biaya BHP Non Medis

Biaya BHP Non Medis merupakan biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang terdapat di Poli KIA-KB khusus pelayanan ANC, KB Suntik, dan Imunisasi. Dari tabel 10. menunjukkan bahwa biaya bahan habis pakai non medis yaitu sebesar Rp.8.417.000,00.

Gaji Pegawai

Gaji pegawai merupakan gaji pegawai yang melayani pelayanan di Poli KIA-KB.

Tabel 12. Biaya Penunjang Untuk Poli KIA-KB Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Biaya Penunjang	Biaya (Rp)	Alokasi (Rp)
Administrasi	164.563.441	24.680.467
Kebersihan	7.207.200	1.081.080
Logistik	29.825.450	4.473.818
Kepegawaian	38.578.500	5.786.775
Jumlah		36.022.140

Sumber: Data Sekunder Puskesmas Ngemplak II tahun 2015

Namun, gaji pegawai yang dihitung adalah gaji pegawai honor yang terdapat di Poli KIA-KB sedangkan gaji untuk pegawai tetap tidak

dihitung karena pegawai tetap mendapat gaji dari pemerintah setiap bulan.

Dari tabel 11 menunjukkan bahwa biaya gaji pegawai untuk Poli KIA-KB yaitu sebesar Rp.7.410.000,00.

4. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung adalah biaya yang digunakan secara tidak langsung demi kelancaran pelayanan, misalnya biaya administrasi, biaya logistik, biaya kebersihan, dan biaya kepegawaian.

Data tabel 12 menunjukkan bahwa jumlah biaya penunjang yang sudah dialokasikan 15% ke unit KIA-KB yaitu sebesar Rp.36.022.140,00. Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya administrasi Rp.24.680.467,00, biaya kebersihan Rp.1.081.080,00, biaya logistik Rp.4.473.818,00, biaya kepegawaian

Tabel 13. Biaya Total Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

	Komponen Biaya	Biaya Total (Rp)
Biaya Tetap (<i>Fixed Cost</i>)	Biaya Penyusutan Gedung	6.393.355
	Biaya Penyusutan Alat Medis	3.672.094
	Biaya Penyusutan Alat Non Medis	20.259.900
	Biaya Penyusutan Kendaraan	5.344.200
		47.740.684
Biaya Semivariabel	Biaya Pemeliharaan Gedung	2.389.965
	Biaya Pemeliharaan Alat Medis	1.728.079
	Biaya Pemeliharaan Alat Non Medis	190.500
	Biaya Gaji Pegawai	7.410.000
	Biaya Penunjang	36.022.140
Biaya Tidak Tetap (<i>Variable cost</i>)		1.020.412
	Biaya Listrik	900.000
	Biaya Telepon	120.412
Jumlah		84.430.645

Tabel 14. Biaya Obat dan Bahan Habis Pakai Pelayanan ANC Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Nama Obat dan BHP	Biaya (Rp)
Jely	200
Tisu	100
Spet	637
Vaksin	330
Tab. Besi	2.185
Jumlah	3.452

Tabel 15. Biaya Obat dan Bahan Habis Pakai Pelayanan KB Suntik Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Nama Obat dan BHP	Biaya (Rp)
Sput	637
Kapas	200
DMA	6.250
Handskoone	761
Alkohol	98
Jumlah	7.946

Tabel 16. Biaya Obat dan Bahan Habis Pakai Pelayanan Imunisasi Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Nama Obat dan BHP	Biaya (Rp)
Kapas steril	800
Sput	637
Vaksin	1.225
Handskoone	761
Alkohol	98
Jumlah	3.521

Rp.5.786.775,00. Pada penelitian ini, biaya gaji tidak termasuk dalam biaya kepegawaian, yang termasuk dalam biaya kepegawaian pada penelitian ini yaitu biaya perjalanan dinas luar kota, biaya diklat, biaya seminar, biaya makan dan minum.

Dari tabel 13. Menunjukkan kompenan biaya terbesar adalah biaya semivariabel yaitu sebesar Rp.84.430.645.00.

5. Biaya Satuan (*Unit Cost*)

Biaya satuan dapat diartikan sebagai biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan produk (barang atau jasa).

Pada penelitian ini, pelayanan ANC mengeluarkan biaya obat dan bahan habis pakai sebesar Rp.3.452, pelayanan KB Suntik

mengeluarkan biaya obat dan bahan habis pakai sebesar Rp.7.946 dan pelayanan imunisasi mengeluarkan biaya obat dan bahan habis pakai sebesar Rp.3.521. Perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 14, 15 dan 16.

Untuk menghitung biaya satuan masing-masing jenis produk pelayanan adalah dengan menjumlahkan RVU dengan biaya normatif.

a. Biaya Satuan *Antenatal Care* (ANC)

Biaya Satuan = RVU pelayanan ANC + Biaya Normatif ANC

$$RVU = \frac{FC}{C} + \frac{VC}{Q} = \frac{83.410.233}{5.184} + \frac{1.020.412}{2.355} =$$

16.523

Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) untuk satu kali pelayanan mengeluarkan biaya untuk BHP / obat sebesar Rp. 3.452,00 untuk satu kali tindakan.

Biaya Satuan = RVU + Biaya normatif ANC

$$= 16.523 + 3.452 = 19.975$$

Jadi, Biaya Satuan untuk pelayanan *Antenatal Care* (ANC) yaitu sebesar Rp. 19.975,00.

b. Biaya Satuan KB Suntik

Biaya Satuan = RVU pelayanan KB Suntik + Biaya Normatif KB Suntik

$$RVU = \frac{FC}{C} + \frac{VC}{Q} = \frac{83.410.233}{5.184} + \frac{1.020.412}{1.418} =$$

16.810

Pelayanan KB Suntik untuk satu kali pelayanan mengeluarkan biaya untuk BHP / obat sebesar Rp. 7.946,00 untuk satu kali tindakan.

Biaya Satuan = RVU + BHP dan Obat untuk satu kali pelayanan = 16.810 + 7.946 = 24.756

Jadi, Biaya Satuan untuk pelayanan KB Suntik yaitu sebesar Rp. 24.756,00.

c. Biaya Satuan Imunisasi

Biaya Satuan = RVU pelayanan Imunisasi + Biaya Normatif Imunisasi

$$RVU = \frac{FC}{C} + \frac{VC}{Q} = \frac{83.410.233}{5.184} + \frac{1.020.412}{1.220} = **16.926**$$

Tabel 17. Perhitungan Biaya Satuan (*Unit Cost*) Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

Unit KIA-KB	Q	UC
ANC	2.355	Rp.19.975
KB Suntik	1.418	Rp.24.756
Imunisasi	1.220	Rp.20.446
Jumlah	4.993	

Tabel 18. Perbandingan Tarif Di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman

	Jenis Pelayanan		
	ANC	KB Suntik	Imunisasi*
Tarif Subsidi (Rp)	5,000	12,500	5,000
Tarif Non Subsidi (Rp)	17,000	24,000	17,000
Tarif BPJS (Rp)	25,000	15,000	*
Biaya Satuan (Rp)	19,975	24,756	20,447
Tarif Subsidi (Rp)	(14,975)	(12,256)	(15,447)
Tarif Non Subsidi (Rp)	(2,975)	(756)	(3,447)
Tarif BPJS (Rp)	5,025	(9,756)	*

*tidak diketahui klaim untuk BPJS

Pelayanan Imunisasi untuk satu kali pelayanan mengeluarkan biaya untuk BHP/obat sebesar Rp.3.521,00 untuk satu kali tindakan.

Biaya Satuan = RVU + BHP dan Obat untuk satu kali pelayanan
 = 16.925 + 3.521 = 20.446
 Jadi, Biaya Satuan untuk pelayanan KB Suntik yaitu sebesar Rp.20.447,00.

Dari tabel 18 menunjukkan biaya satuan untuk pelayanan ANC yaitu sebesar Rp.19.975,00 untuk pelayanan KB Suntik yaitu sebesar Rp.24.756.00 dan untuk pelayanan Imunisasi yaitu sebesar Rp.20.447.00. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tarif yang berlaku untuk pelayanan ANC, KB Suntik dan Imunisasi di Puskesmas Ngemplak II saat ini masih dibawah biaya satuan (*unit cost*).

Biaya satuan dapat diartikan sebagai biaya yang diperlukan atau dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan produk (barang atau jasa). Untuk mendapatkan biaya satuan (*unit cost*), secara konseptual cukup dengan melihat biaya total yang telah dihitung lalu dibagi dengan jumlah atau *volume* selama satu tahun bersangkutan.

Tarif atau *price* adalah harga dalam nilai uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh atau mengkonsumsi suatu komoditas, yaitu barang atau jasa.¹ Tarif tidaklah sama dengan harga. Sekalipun

keduanya menunjuk pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen, tetapi pengertian tarif ternyata lebih terkait pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa pelayanan, sedangkan pengertian harga lebih terkait pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada Poli KIA-KB diperoleh biaya satuan (*unit cost*) untuk pelayanan ANC yaitu sebesar Rp.19.975,- dengan selisih tarif perda untuk pasien dari luar Kabupaten Sleman (non subsidi) yaitu Rp.(-2.979). Pelayanan KB Suntik yaitu sebesar Rp.24.756,- dengan selisih tarif perda untuk pasien dari luar Kabupaten Sleman (non subsidi) yaitu Rp.(-756). Sedangkan, pelayanan Imunisasi yaitu sebesar Rp.20.447,- dengan selisih tarif perda untuk pasien dari luar Kabupaten Sleman (non subsidi) yaitu Rp.(-3.447). Hal ini menunjukkan bahwa tarif pelayanan ANC, KB Suntik, dan Imunisasi untuk pasien dari luar Kabupaten Sleman masih di bawah biaya satuan (*unit cost*).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelayanan ANC memiliki selisih tarif perda untuk pasien dari Kabupaten Sleman (subsidi) yaitu Rp.(-14.979), pelayanan KB Suntik dengan selisih tarif perda untuk pasien dari luar Kabupaten Sleman (subsidi) yaitu Rp.(-12.256). Sedangkan, pelayanan Imunisasi dengan selisih

tarif perda untuk pasien dari Kabupaten Sleman (subsidi) yaitu Rp.(-15.447). Hal ini menunjukkan bahwa tarif pelayanan ANC, KB Suntik, dan Imunisasi untuk pasien dari luar Kabupaten Sleman masih di bawah biaya satuan (*unit cost*).

Sedangkan, selisih klaim BPJS untuk pelayanan ANC yaitu sebesar Rp.(+5.021), selisih klaim BPJS untuk pelayanan KB Suntik yaitu sebesar Rp.(-9.756) dan selisih klaim BPJS untuk imunisasi tidak diketahui dikarenakan pihak puskesmas tidak mengetahui klaim untuk pelayanan imunisasi tersebut.

Hasil penelitian lain yang sejalan dengan hasil penelitian mengenai biaya satuan (*unit cost*) ini, yaitu penelitian tentang Penetapan Tarif Rasional Pelayanan Kesehatan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhitungan *unit cost* lebih besar dari tarif yang digunakan saat ini sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone sebaiknya melakukan pertimbangan mengenai penyesuaian tarif pelayanan kesehatan berdasarkan *unit cost*.

Penelitian lainnya yang juga meneliti tentang unit cost adalah penelitian Perhitungan Biaya Satuan (*Unit Cost*) Di Puskesmas Dangung-Dangung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 yang hasilnya tidak sejalan dengan penelitian ini yaitu biaya satuan rawat jalan dan laboratorium perpelayanan tanpa biaya investasi dan gaji PNS di Puskesmas Dangung-Dangung lebih rendah dari tarif yang berlaku. Tetapi untuk penghitungan biaya satuan di poli KIA lebih tinggi dari tarif yang berlaku yang hasil tersebut sama dengan hasil penelitian ini.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pelayanan Antenatal Care, KB Suntik, dan Imunisasi untuk pasien yaitu di bawah biaya satuan (*unit cost*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui tarif yang telah diatur oleh pemerintah daerah untuk pasien masih berada dibawah biaya satuan maka disarankan agar pemerintah

daerah menetapkan kembali tarif untuk pasien agar sesuai dengan biaya satuan (*unit cost*).

Bagi Puskesmas Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai biaya satuan (*unit cost*) untuk pelayanan *Antenatal Care* (ANC), KB Suntik dan Imunisasi di Puskesmas Ngemplak II, sehingga pihak puskesmas dapat memberitahukan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan analisis terbaru biaya satuan (*unit cost*).

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal bagi peneliti selanjutnya untuk mengadakan penelitian serupa dengan menambahkan *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP).

DAFTAR PUSTAKA

- Diego, F. 2017. From Periphery to Centre: Local Government and the Emergence of Universal Healthcare in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia* Vol. 39, No. 1, pp. 178–203
- Thabrany, H., Sari, K., Tilden, R., Dunlop, D, W., Hajaraeni, Y. 2015. *Supporting Indonesia's SJSN to Develop National Guidelines for Implementing a National Social Health Insurance Program by 2014*. Depok, Indonesia: Center for Health Economics and Policy Studies, School of Public Health, University of Indonesia, p. 20
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Subirman. 2012. Perhitungan Biaya Satuan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas di Kota Samarinda. *Arc. Com. Health*, 1 (2) Desember, pp. 90-97.
- Straube B. 2005. *TheCMSQuality Roadmap: quality plus efficiency*. Health Aff (Millwood). (suppl Web exclusives):W5-555-W5-557
- Armen, F., Azwar, V. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Pemerintahan Kabupaten Sleman. 2012. *Peraturan Bupati Sleman Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat*.
- Puskesmas Ngemplak II. 2014. *Profil Puskesmas Ngemplak II*. Sleman: Puskesmas Ngemplak II.
- Azwar.A. 2010. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Tangerang: PT. Binarupa Aksara Publisher.

- Darmawansyah. 2018. Penetapan Tarif Rasional Pelayanan Kesehatan RSUD Tenriwaru Kabupaten Bone. *Jurnal MKMI*. Vol. 14 No. 2.
- Erwin Eria. 2015. *Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Di Puskesmas Dandung-Dandung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013*. Thesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada